

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Definisi tentang Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 , hlm. 336).

Internalisasi adalah integrasi nilai-nilai dalam diri seseorang, atau dalam psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik, dan aturan normatif pada seseorang (Rohmat, Mulyana, 2004 hlm. 21). Pengertian ini mengandung makna bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam praktik dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini tetap bersifat permanen dalam diri seseorang. Sehingga internalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memasukan nilai-nilai ke dalam jiwa agar menjadi miliknya (Fuad, Ihsan, 1997 hlm. 155).

Menurut Muhaimin (1996, hlm. 153 dalam Buku Strategi Belajar Mengajar) dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik ada tiga tahap yang mewakili proses terjadinya internalisasi, dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Informasi Nilai

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan siswa. Transformasi nilai ini hanyalah transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Nilai-nilai yang

diberikan selalu berada dalam lingkup persepsi siswa, dan pengetahuan tersebut bisa hilang jika daya ingat seseorang tidak baik. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan salah satu contoh transformasi nilai dalam proses internalisasi nilai.

b) Tahap Transaksi Nilai

Pada tahap ini pendidikan nilai berlangsung melalui komunikasi dua arah antara pendidik dan siswa bersifat timbal balik sehingga terjadi proses interaktif. Melalui transaksi nilai, pendidik dapat memberikan dampak kepada peserta didiknya melalui contoh-contoh nilai yang telah mereka terapkan. Namun siswa akan menentukan sendiri nilai yang sesuai. Contoh transaksi nilai adalah ketika orang tua mengajarkan pendidikan moral. Selain menjelaskan pentingnya pendidikan akhlak, orang tua juga memberikan contoh kepada anaknya. Hal ini membantu anak lebih cepat menyerap dan mengaplikasikannya, karena biasanya apa yang dirasakan anak secara langsung lebih mudah diingat dibandingkan apa yang diucapkan.

c) Tahap Transinternalisasi

Tahap ini jauh lebih dalam dibandingkan tahap transaksi. Pada tahap ini tidak hanya dilakukan melalui komunikasi verbal tetapi juga sikap mental dan karakter. Oleh karena itu, pada tahap ini komunikasi personal berperan aktif. Pada masa ini, pendidik sangat perlu memperhatikan sikap dan perilakunya agar tidak bertentangan dengan apa yang dibawakannya kepada peserta didik. Hal ini disebabkan siswa cenderung meniru sikap mental dan kepribadian gurunya.

Menurut Kalidjernih (2010, hlm. 71) internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan proses belajarnya seseorang sehingga itu dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat,

kemudian dirinya mengikat ke dalam nilai dan norma sosial dari perilaku kelompoknya di masyarakat.

2. Pengertian tentang Nilai-Nilai

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.

Menurut Thames dan Thomson dalam buku Lestari nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang mempengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan. Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang-orang di sekitar individu. Sumber-sumber yang dimiliki individu seperti waktu, uang dan kekuatan otak dapat dihabiskan untuk hal-hal yang dianggap bernilai (Sri Lestari, 2012 hlm. 77).

Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu. Misalnya, bunga itu indah perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan (Kaelan, 2010 hlm. 87).

Nilai merupakan suatu yang dirapkan (*das solen*) oleh manusia. Nilai merupakan sesuatu yang baik diciptakan. Nilai menjadikan manusia untuk terdorong melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia sehingga mendorong manusia untuk berbuat. Kegiatan manusia pada dasarnya digerakan untuk didorong nilai (Hermianto dan Winarno, 2012).

Selain itu, peneliti mengetahui beberapa macam nilai yang ada pada kehidupan sehari-hari. Diantaranya ada nilai etika, nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai ekonomi.

a) Nilai Etika

Nilai etika mengacu pada prinsip atau standar moral yang digunakan untuk mengevaluasi benar atau salahnya tindakan atau keputusan. Nilai-nilai etika seringkali menjadi pedoman perilaku

manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan pertimbangan terhadap konsekuensi tindakan. Nilai etika bisa berbeda-beda menurut budaya, agama, dan filsafat, namun ada juga prinsip yang dianggap *universal*, seperti prinsip hak asasi manusia (Rachels, J., & Rachels, S. 2019 dalam jurnal *The Elements of Moral Philosophy*).

b) Nilai Moral

Nilai moral adalah prinsip-prinsip atau standar yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam konteks moral. Nilai-nilai moral memandu perilaku individu dan mempengaruhi keputusan yang diambilnya ketika berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Nilai-nilai moral seringkali berakar pada budaya, agama, dan filsafat dapat berbeda-beda antar individu dan kelompok. Nilai moral sering kali melibatkan pertimbangan martabat, keadilan, kejujuran, dan empati terhadap orang lain. Mereka membentuk dasar standar moral yang mengatur interaksi individu dengan masyarakat (Rachels, J. 2019 dalam jurnal *The Elements of Moral Philosophy*).

c) Nilai Budaya

Nilai budaya mengacu pada prinsip atau keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam budaya tertentu. Nilai-nilai tersebut meliputi norma, tradisi, kepercayaan, dan cara pandang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya membentuk identitas dan perilaku suatu budaya, mempengaruhi cara individu dalam budaya tersebut berinteraksi, memahami, dan menafsirkan dunia sekitarnya. Nilai-nilai budaya mencerminkan aspek-aspek yang dianggap penting, berharga, dan dilindungi dalam suatu budaya. Ini mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, ritual, sistem kepercayaan, dan konsep kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Ini juga dapat mempengaruhi berbagai

aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, politik, ekonomi, serta ekspresi budaya dan seni (Hofstede, G. 2001 dalam jurnal *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*).

d) Nilai Pendidikan

Nilai pendidikan merupakan nilai yang mendidik ke arah yang lebih baik dan berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam upaya mendewasakan diri melalui proses pendidikan. Nilai-nilai pendidikan mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat, mengingat pendidikan sebagai sarana pembangunan bagi individu dan seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang mendukung dan mendorong perkembangan siswa secara holistik. Melalui pendidikan, individu diharapkan dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif (Kohlberg, L. 1984 dalam jurnal *The Psychology of Moral Development*).

e) Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi adalah nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang ekonomi berdasarkan manfaat yang diperolehnya dari barang tersebut. Secara umum nilai ekonomi menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik tingkat individu, bisnis, atau pemerintah. Prinsip-prinsip seperti alokasi sumber daya yang efisien, distribusi produksi ekonomi yang adil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dari nilai ekonomi. Nilai-nilai ini mempengaruhi kebijakan ekonomi, strategi bisnis, dan keputusan pribadi mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan konsumsi (Keynes, J. M. 1936 dalam jurnal *The General Theory of Employment, Interest and Money*).

Dengan demikian, nilai merupakan hasil dari suatu usaha maupun sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu.

3. Tinjauan tentang Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Upaya merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi suatu masalah. Upaya tersebut dapat mencakup berbagai kegiatan, strategi, atau intervensi yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan tertentu. Sasaran upaya ini bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan kesehatan, memperbaiki lingkungan, meningkatkan keselamatan, atau mencapai hasil positif di berbagai lingkungan. Berikut adalah beberapa macam upaya yang umum dilakukan dalam berbagai konteks, seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan keamanan.

a) Upaya Pendidikan

Upaya pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Piaget (1970), upaya pendidikan harus memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan oleh siswa. Guru diharapkan membantu siswa dalam mengonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran.

Menurut Vygotsky, L. S. (1978) menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Upaya pendidikan harus memperhatikan bidang perkembangan actual siswa dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantu mereka mencapai bidang perkembangan proksimalnya.

b) Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan rehabilitasi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi, dan individu atau komunitas.

Menurut Hochbaum, G. M. (1958) mengemukakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh keyakinan pribadi tentang penyakit, persepsi tentang tingkat keparahan penyakit, kemungkinan tertular penyakit, manfaat dari perilaku pencegahan, dan hambatan yang menghambat perilaku pencegahan.

c) Upaya Lingkungan

Upaya lingkungan sama dengan pelestarian lingkungan hidup yang dimana suatu proses atau metode perlindungan terhadap kehancuran dan kerusakan. Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menjamin pemanfaatan cadangan sumber daya secara berkelanjutan, khususnya dengan terus meningkatkan kualitas dan menjaga keanekaragamannya.

Menurut Bronfenbrenner, U. (1979) menekankan pentingnya memahami interaksi kompleks antara individu, lingkungan, termasuk mikrosistem, mesosystem, ekosistem, dan makrosistem yang saling mempengaruhi untuk membentuk perilaku dan pengalaman individu.

d) Upaya Keamanan

Upaya keamanan adalah upaya untuk mengamankan sesuatu, baik itu negara, individu, kelompok etnis, lingkungan hidup atau bahkan kelestarian daratan planet bumi itu sendiri.

Menurut Clarke, R. V. (1992) mengemukakan pentingnya mengelola situasi dan meningkatkan pengetahuan situasional untuk mencegah kejahatan. Dengan memahami situasi dan lingkungan

yang dapat menjadi sasaran pelaku kejahatan, maka upaya keamanan dapat dilakukan secara proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Secara umum, upaya pencegahan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah terulangnya suatu masalah atau kejadian buruk di masa mendatang. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat menyebabkan kerugian, cedera atau kerusakan.

4. Definisi tentang Perundungan

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan, baik verbal, fisik, atau sosial di dunia nyata atau *online*. Perundungan juga membuat orang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik perilaku tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Menurut Siswanti dan Widayanti (2009), tindakan *bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresif. Seperti halnya penghinaan, ancaman sering kali merupakan hasutan yang dapat berujung pada tindakan kekerasan. Menurut Smith dan Thompson (Yusuf & Fahrudin, 2012). Perundungan diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dengan sengaja menimbulkan kerugian fisik dan mental pada orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku perundungan melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sengaja.

Menurut data *Global Children's Survey* di Indonesia, Kota Bandung mempunyai tingkat *bullying* yang cukup tinggi. Sebanyak 48,9% siswa SD di Kota Bandung dipukul minimal satu kali oleh siswa lain di sekolah dalam sebulan terakhir, 61,4% siswa SD di Kota Bandung Bandung dipukul oleh siswa lain di sekolah, dihina sekolah minimal satu kali dalam sebulan terakhir, dan hingga 47% siswa sekolah dasar di kota Bandung telah dikucilkan oleh siswa lain di kelasnya setidaknya sekali dalam sebulan terakhir (Borualogo & Gumilang, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Copeland dkk. (2013) menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban perundungan memiliki resiko

depresi dan bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mengalami perundungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan di Korea oleh Kim, Koh, dan Leventhal (2005). Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Leventhal (2008) menunjukkan bahwa angka probabilitas meningkat dari 1,40 menjadi 10,00 yang menyiratkan peningkatan resiko ide dan perilaku bunuh diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat aspek-aspek tertentu yang memunculkan perilaku bullying. Solberg & Olweus (Maghfirah dan Rachmawati, 2009) membahas beberapa aspek terkait aksi perundungan, diantaranya:

- a) Aspek *Indirect*, tindakan untuk melakukan penolakan atau mengeluarkan dan menjauhi seseorang dari gerombolan pertemanan atau meninggalkannya dari berbagai hal yang disengaja.
- b) Aspek *Physical*, tindakan yang dilakukan dengan memukul, menendang, mendorong yang bertujuan untuk melukai atau mencederai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan menurut Yusuf & Fahrudin (2012) yakni sebagai berikut :

- a) Faktor Individu, ada dua kelompok individu yang terlibat langsung dalam insiden perundungan yaitu pelaku dan korban. Kepribadian dan karakteristik sikap seseorang dapat berkontribusi terhadap suatu tindakan perundungan.
- b) Faktor Keluarga, tidak hanya dari segi kepribadian dan sikap pribadi, keluarga juga berperan penting dalam terjadinya *bullying*. Seorang anak yang tidak mendapat cukup kasih sayang atau pendidikan akan cenderung menjadi seorang pelaku perundungan.
- c) Faktor Teman Sebaya, berperan penting dalam berkembangnya perilaku perundungan. Dalam banyak kasus, orang-orang seusia menjadi saksi atau mendapati mereka hanya diam dan tidak melakukan intervensi.

d) Faktor Media, sama seperti saat ini banyak program tentang kekerasan, pelecehan, dan intimidasi yang ditayangkan di televisi atau jejaring sosial. Hanya dalam beberapa menit setelah mengamati tindakan tersebut, baik langsung maupun jangka panjang, anak-anak akan meniru apa yang mereka tonton. Seolah-olah dia merasa hebat dan sombong lama kelamaan hal ini menjadi darah daging dalam dirinya dan berujung pada sifat perundungan dalam kesehariannya.

Menurut Rigby (Astuti, 2008) terdapat tiga karakteristik perundungan yang biasanya dilakukan di sekolah, antara lain:

- a) Adanya perilaku agresif yang membuat dirinya senang dalam menyakiti korbannya.
- b) Tindakan itu dilakukan tidak sama rata sehingga timbulnya rasa tertekan pada korban.
- c) Tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

Dengan demikian, perundungan merupakan perilaku yang tidak terpuji, tidak dapat diterima, dan merugikan orang lain. Perundungan dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial. Pencegahan perundungan melalui pendidikan, kesadaran, dan intervensi yang tepat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang.

5. Penjelasan tentang Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima prinsip atau nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pedoman bagi perkembangan dan penyesuaian kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Menurut Winarno (2017, hlm. 30), Pancasila merupakan landasan utama pendidikan karakter bangsa. Sebagai landasan, Pancasila

merupakan acuan, standar, dan sekaligus tujuan dalam pengembangan jati diri bangsa. Pancasila juga merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar administrasi pemerintahan negara.

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena negara berdasarkan Pancasila dan tujuan masyarakat adil dan makmur juga berdasarkan Pancasila, maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut harus juga Pancasila. Jadi hal ini dapat dikatakan berdasarkan Pancasila dengan pedoman Pancasila untuk Pancasila. Jika salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi maka tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak akan tercapai.

Menurut Munir, MBM, Salamah, dan Suratman, (2015, hlm. 45-46), dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai legalitas penuh. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

- a) Pancasila adalah dasar negara dan sumber hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan asas spiritual tatanan, hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dikemukakan dalam empat pokok pikiran.
- b) Mencakup suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d) Terdapat peraturan yang mengharuskan UUD mempunyai muatan yang mewajibkan pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya (termasuk organisasi partai dan kelompok fungsional) untuk menjunjung tinggi cita-cita moral luhur masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politiknya bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai

pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan zaman (Munir, MBM., Salamah., dan Suratman 2015, hlm. 52-54).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan hukum formal yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian pertama ayat IV. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dikukuhkan dengan diundangkannya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dan pencabutan ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P4. Pasal 1 ketetapan MPR dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma (paradigma pengembangan iptek pembangunan POLEKSOSBUD HANKAM, pengembangan bidang politik, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, pengembangan hukum, pengembangan hankam, pengembangan kehidupan beragama, dan sebagai paradigma reformasi).

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila dalam konteks dasar negara, yakni Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler serta dalam konteks ideologi bukan individualism dan bukan kolektivisme adalah benar adanya. Itu adalah pernyataan yang tepat untuk mengekspresikan kesepakatan para pendiri negara (*founding people*) ketika bersepakat mendirikan negara ini pasca tahun 1945.

Menurut Fred W. Riggs, Pancasila sebagai konsep primastik, yaitu konsep yang mengambil segi-segi, yakni dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara Pancasila bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama

tertentu, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama.

Nurhasan Ismail mengatakan bahwa pengelolaan nilai kepentingan dan nilai sosial dari konsepsi yang seperti ini harus mengarah pada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama serta nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Itulah konsep Pancasila sebagai konsep prismatic yang mempertemukan secara integratif segi-segi baik dari berbagai konsep yang dipandang saling bertentangan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari sistem hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas Indonesia yang berbeda dari sistem hukum yang lain. Mesti belakangan ini, banyak orang yang merasa kurang gagah untuk menyebut sistem hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam pembangunan hukum.

Hal ini dapat dipahami karena semangat Pancasila sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamisme sosial. Dengan pemikiran yang berlandaskan prinsip-prinsip spiritual negara sebagai visi kehidupan berbangsa, maka kedinamisan masyarakat dan negara akan senantiasa dikelilingi dan berpedoman pada prinsip-prinsip spiritual negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara republik Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan landasan untuk mencapai gerak dalam kehidupan, namun sekaligus juga menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Internalisasi Sila ke Dua

Sila ke dua Pancasila menekankan perlunya memperlakukan semua individu secara adil. Dalam konteks pencegahan perundungan,

perlakuan yang adil berarti menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, agama, atau status lainnya. Dengan memperlakukan semua individu secara adil, kita dapat mencegah terjadinya aksi perundungan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak, kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Kemanusiaan yang beradab mencerminkan perlunya berperilaku dengan cara yang sopan, menghargai, dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Dalam upaya pencegahan aksi perundungan, pendekatan yang beradab memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang baik antarindividu, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan terhormat. Berikut beberapa penjelasan tentang internalisasi lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

- a) Penghargaan terhadap HAM, Internalisasi Sila Kedua melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, dan hak-hak lainnya yang mendasar bagi setiap individu.
- b) Keadilan sosial, Internalisasi Sila Kedua juga mencakup konsep keadilan sosial, yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, distribusi kekayaan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka.

- c) Toleransi, Salah satu aspek penting dari Sila Kedua adalah toleransi, yang melibatkan penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, suku bangsa, atau pandangan politik. Internalisasi Sila Kedua mempromosikan dialog antarbudaya dan kerjasama antaragama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
- d) Empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami pengalaman orang lain, serta bersikap empati terhadap kesulitan dan penderitaan sesama manusia, juga merupakan bagian dari internalisasi Sila Kedua. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan bertindak dengan belas kasihan dan kepedulian.
- e) Penghargaan terhadap martabat manusia, Internalisasi Sila Kedua juga mencakup penghargaan terhadap martabat manusia, yang menuntut perlakuan yang layak dan menghormati setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Pancasila memberikan kekuatan yang diperlukan untuk membawa Indonesia maju menuju era kejayaan sebagai bangsa yang layak beradab (Adha & Susanto, 2020 hlm. 121). Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman dan acuan bagi kita bangsa Indonesia. Masing-masing sila mempunyai poin-poin penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila ke dua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam prinsip kedua ini terdapat berbagai nilai yang dapat kita terapkan, salah satunya adalah perlu adanya seseorang yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan rasa keadilan dan budi pekerti yang baik.

Konsekuensi nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama.

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semana-mena sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Darmodihardjo, 1996).

7. Pengertian tentang Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.

Lingkungan pendidikan mencakup beragam aspek yang meliputi fisik, sosial, emosional, dan akademik di mana proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Berikut penjelasan tentang aspek-aspek lingkungan pendidikan.

- a) Aspek fisik, lingkungan pendidikan fisik mencakup bangunan, ruang kelas, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan infrastruktur pendukung lainnya. Lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Faktor-faktor seperti pencahayaan, ventilasi, keamanan, dan kebersihan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan produktivitas belajar.
- b) Aspek sosial, lingkungan pendidikan sosial meliputi interaksi antara siswa, guru, staf, dan komunitas sekolah. Hubungan yang baik dan inklusif antara semua pihak dapat menciptakan atmosfer yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Pentingnya kerjasama, saling penghargaan, dan pembangunan komunitas yang kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.
- c) Aspek emosional, lingkungan pendidikan emosional mencakup dukungan sosial, pemahaman, dan pengakuan terhadap kebutuhan emosional siswa. Lingkungan yang memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional siswa dapat membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan tantangan lainnya yang mungkin mereka hadapi dalam proses belajar. Program-program konseling, dukungan psikologis, dan kegiatan-kegiatan *social emotional*

learning (SEL) dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional yang sehat.

- d) Aspek akademik, lingkungan pendidikan akademik mencakup kurikulum, metode pengajaran, sumber daya pembelajaran, dan penilaian. Lingkungan ini harus mendorong eksplorasi, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa. Kurikulum yang relevan, pengajaran yang inovatif, dan penggunaan teknologi pendidikan yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Menyediakan lingkungan pendidikan yang holistik dan mendukung merupakan tanggung jawab bersama bagi semua stakeholder, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat dan komitmen terhadap kesejahteraan dan kesuksesan setiap individu merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Menurut (Slameto, 2003 hlm. 60) yang merupakan dari bagian penting lingkungan pendidikan berpengaruh dalam proses belajar menjadi tiga faktor yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.

- a) Lingkungan keluarga, menurut Hakim (2005, hlm. 17) lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang menentukan keberhasilan akademik seseorang. Kenyataannya adalah sebagian besar siswa berada di rumah. Seiring dengan kepedulian orang tua yang besar, kondisi ekonomi yang memadai dan keharmonisan keluarga menjadi cara penting bagi siswa untuk merasa terdidik di rumah.
- b) Lingkungan sekolah, adalah tempat berlangsungnya kegiatan dan proses pendidikan pembelajaran dan pelatihan. Di sekolah akhlak, kecerdasan, dan etika semuanya dilatih untuk berkembang. Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat yang istimewa untuk keberhasilan pembelajaran (Tu'u 2004, hlm. 18).

- c) Lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan di masyarakat seringkali tidak terlihat, namun pada kenyataannya seorang siswa mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk dapat rajin belajar dan berhasil, misalnya saja seorang siswa melihat tetangganya rajin belajar dan beribadah, dengan begitu siswa tersebut bisa menangkap apa yang dia lihat lalu mencontohkan pada kehidupan sehari-harinya (Slameto, 2003).

Dengan demikian lingkungan pendidikan merupakan tempat penting bagi peserta didik mengetahui berbagai pengetahuan yang sebelumnya mereka ketahui. Dalam beberapa lingkungan pendidikan yang sudah dijelaskan tersebut lingkungan sekolah yang merupakan peran penting bagi peserta didik dalam mengetahui segala tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian yang memiliki kasus hampir serupa mengenai kasus perundungan yang berada di lingkungan pendidikan. Digunakan oleh peneliti untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai konsep studi kasus melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

Peneliti melakukan langkah awal dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga dengan demikian peneliti mendapat referensi pendukung, pelengkap, dan pembanding dalam menyusun skripsi secara komprehensif.

No	Judul	Peneliti	Tahun	Perbedaan	Hasil
1.	Pengaruh Perundungan terhadap Gangguan	Denaya Ayu, Nazwa Nur Afifah, Rida Nurul, Ridwan	2023	Lingkungan pendidikan yang ber-beda	Adanya pengaruh buruk yang berdampak pada

	Psikologis bagi Mahasiswa	Effendi, Ratna Fitria			psikologis mahasiswa
2.	Predictor Perundungan Siswa Sekolah Dasar	Ihsana Sabriani Borualago, Hedi Wahyudi, Suliswoto Kusdiyati	2019	Tidak adanya cara pencegahan aksi perundungan	Peran seorang guru sangat penting untuk mendidik siswa
3.	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan	Bunyamin Maftuh	2008	Pembahasan yang berfokus pada pembelajaran PKn	PKn memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai Pancasila kepada siswa
4.	Peran Guru terhadap Aksi Perundungan guna Menciptakan Pendidikan Berkualitas di SMPN 19 Kota Bekasi	Mahawira, Adzin, Abiyyu, Amru Gibran, Bimo	2023	Lingkungan pendidikan yang berbeda dan penelitian ini berfokus terhadap peran guru	Adanya pengaruh baik pada peran guru untuk pendidikan yang berkualitas
5.	Penerapan Nilai Toleransi dalam Meminimalisasi terjadinya Aksi Perundungan di Lingkungan Kampus	Jennifer, Bening, Honey Putri, Aini Sartika, Nabilah	2023	Penelitian ini pada lingkungan kampus dan fokus pada penerapan nilai toleransi	Penerapan nilai toleransi demi mengurangi aksi perundungan di kampus
6.	Dampak Perundungan terhadap Tingkat	Abdul Soamole, Aditya	2023	Lebih membahas	Dampak dari perundungan tersebut bisa

	Kepercayaan Diri pada Siswa di Sekolah	Pratama, Aryo Indrawan, Kevin Mahardika, Muhammad Rais		dampak perundungan	memicu banyak hal yang bisa merugikan orang lain
7.	Pencegahan dan Penanganan Aksi Perundungan di Lingkungan SMPN 2 Mataram	Lalu Guna, Adhitya Nini, Ayu Riska Amalia	2023	Dalam menyampaikan berbeda dan lokasi penelitian berbeda	Guru dan orang tua murid peran penting dalam mendidik siswa supaya tidak terjadi hal buruk
8.	Penerapan Nilai Toleransi dalam Meminimalisasi terjadinya Aksi Perundungan di Lingkungan Kampus	Jennifer, Bening, Honey Putri, Aini Sartika, Nabilah	2023	Penelitian ini pada lingkungan kampus dan fokus pada penerapan nilai toleransi	Penerapan nilai toleransi demi mengurangi aksi perundungan di kampus
9.	Perundungan Maya (<i>Cyber Bullying</i>) Pada Remaja Awal	Sartana, Nelia Apriyani	2017	Pembahasan tentang perundungan verbal yang ada di media sosial	Perundungan Cyber Bullying merupakan permasalahan yang serius yang berdampak pada psikologis remaja
10.	Emosi Moral dan Empati pada	Neila Ramdhani	2016	Lebih meneliti dalam rasa	Emosi moral, rasa bersalah,

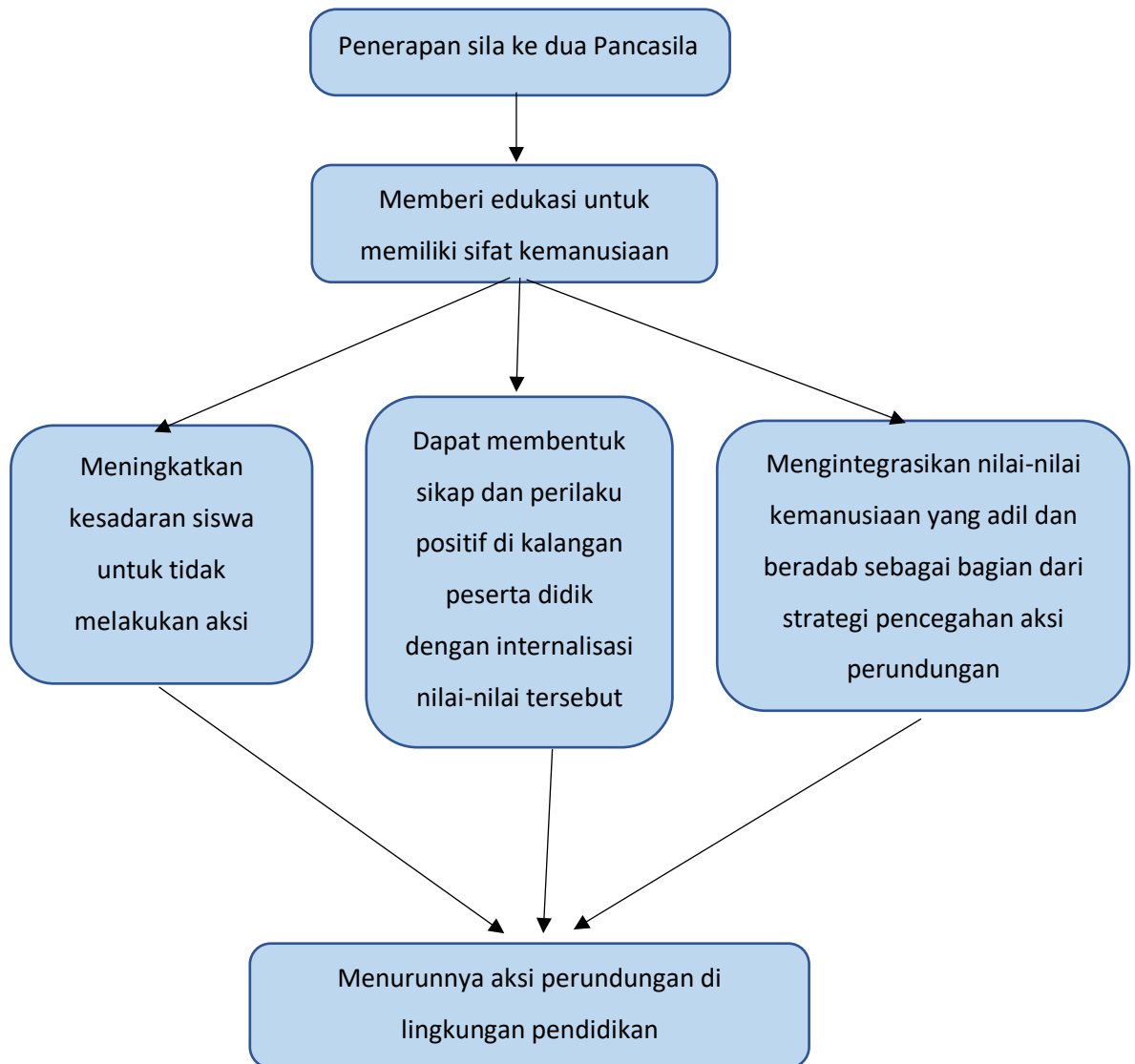
	Pelaku Perundungan- siber			empati dan moral pada pelaku perundungan- siber	malu dan bangga ber- kontribusi terhadap perilaku perundungan- siber
--	---------------------------------	--	--	---	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

(Sumber: Dibuat oleh peneliti)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibuat peneliti ini bertujuan untuk menerapkan perilaku yang terkandung pada nilai sila ke dua Pancasila sebagai upaya pencegahan aksi perundungan di lingkungan pendidikan. Dalam memberikan edukasi tentang dampak buruk aksi perundungan tersebut peneliti berharap dalam penelitian ini aksi perundungan tersebut bisa menurun.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: dibuat oleh peneliti